

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada krisis pengungsi Suriah tahun 2015, Polandia memilih kebijakan penolakan dan pembatasan yang ketat terhadap pengungsi. Polandia menunjukkan penolakan terhadap kuota pengungsi yang ditetapkan oleh Uni Eropa yang mencerminkan kekhawatiran domestik akan dampak negatif terhadap keamanan nasional dan identitas budaya. Namun Uni Eropa menegaskan bahwa negara anggota harus mematuhi keputusan yang telah disepakati, meskipun mereka tidak setuju dengan alasan keamanan nasional atau ketertiban umum, sehingga pengadilan Uni Eropa (*The European Court of Justice*) memutuskan pada 2 April 2020 bahwa Polandia resmi berkasus C-715/17 (Komisi Eropa v. Polandia) yaitu tentang pelanggaran kewajiban hukum yang diatur dalam Council Decision (EU) 2015/1523 dan 2015/1601.

Meskipun Polandia terlibat dalam operasi keamanan bersama dan dukungan kebijakan luar negeri Uni Eropa, negara ini memilih untuk tidak menerima pengungsi secara langsung dan berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan melalui negara-negara tetangga Suriah. Polandia juga khawatir dengan potensi beban finansial termasuk kebutuhan untuk meningkatkan alokasi dana untuk layanan sosial. Pada tahun 2015 tersebut Polandia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang solid namun kekhawatiran akan dampak ekonomi jangka pendek dari penerimaan pengungsi, ditambah dengan resistensi terhadap arahan Uni Eropa yang memperkuat keputusan untuk tidak menerima pengungsi Suriah. Polandia menghadapi aksi penolakan masyarakat yang tidak menerima

kehadiran pengungsi Suriah, Selain itu, terkait kemungkinan dampak terorisme yang juga mempengaruhi kebijakan ini di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Eropa.

Sebaliknya, dalam krisis pengungsi Ukraina pada tahun 2022 Polandia mengadopsi kebijakan penerimaan terbuka terhadap pengungsi Ukraina dan mengesahkan *Special Act on Assistance* pada tanggal 26 Maret 2022. *Special Act on Assistance* merupakan undang-undang khusus yang diberlakukan Polandia untuk memberikan dukungan kepada pengungsi Ukraina yang tiba di Polandia akibat invasi Rusia. Secara politik Polandia dan Ukraina memiliki hubungan historis dan solidaritas yang mendalam. Kedekatan geografis, budaya, dan sejarah menciptakan dorongan kuat bagi Polandia untuk membantu tetangganya dalam masa krisis. Polandia juga mendapat dukungan luas dari masyarakat Polandia. Dukungan ini memperkuat citra internasional Polandia sebagai negara yang bertanggung jawab.

Pengungsi Ukraina dianggap sebagai potensi kontribusi positif bagi perekonomian Polandia, baik dalam jangka pendek melalui konsumsi dan permintaan barang dan jasa, maupun dalam jangka panjang dengan memperkuat angkatan kerja dan membantu mengatasi tantangan demografis. Polandia juga mendapatkan dukungan finansial dari Uni Eropa dan organisasi internasional sehingga sangat membantu Polandia dalam kontribusi kemanusiaan ini. Polandia dan Ukraina memiliki kesamaan budaya dan bahasa yang mempermudah integrasi pengungsi Ukraina. Adanya jaringan sosial yang sudah ada membantu proses penyesuaian dan mengurangi potensi isolasi sosial. Kebijakan Polandia mencakup memfasilitasi interaksi positif antara pengungsi dan masyarakat lokal.

Pendekatan kemanusiaan ini juga memperkuat posisi Polandia sebagai aktor bertanggung jawab di kancah internasional. Teori *Rational Choice* memberikan kerangka kerja untuk memahami keputusan kebijakan Polandia. Kebijakan terhadap pengungsi Suriah didorong oleh pertimbangan rasional untuk meminimalkan risiko dan beban domestik, meskipun mendapat kritik internasional. Sementara itu, kebijakan terhadap pengungsi Ukraina dipengaruhi oleh faktor historis, geografis, dan etnis yang mencerminkan solidaritas dan dukungan kemanusiaan yang memperkuat hubungan bilateral dan mendapatkan dukungan luas masyarakat dan luar negeri. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan bahwa keputusan Polandia bukanlah hasil dari ketidakkonsistenan, melainkan perhitungan rasional dan tujuan spesifik dari masing-masing krisis.

5.2 Saran

Terdapat fenomena menarik yang berkaitan dengan peran kelompok sayap kanan dalam memengaruhi kebijakan isu pengungsi di Polandia. Pada tahun 2015 Polandia berada di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh partai sayap kanan yang mempengaruhi keputusan pembatasan terhadap pengungsi Suriah. Sebaliknya, pada krisis pengungsi Ukraina tahun 2022 Polandia tetap berada di bawah pengaruh sayap kanan, kebijakan yang diterapkan lebih bersifat terbuka dan inklusif. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya fokus pada analisis kelompok yang dapat memengaruhi suatu kebijakan suatu negara, dalam konteks ini ialah kelompok sayap kanan Polandia dalam perubahan kebijakan migrasi Polandia. Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat meneliti pada negara lainnya dengan kasus serupa terhadap kebijakan pengungsi di bawah Uni Eropa.